

e-ISSN: [2964-6057](https://doi.org/10.38035/jhesm.v1i2), p-ISSN: [2964-6065](https://doi.org/10.38035/jhesm.v1i2)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v1i2>

Received: 1 April 2023, Revised: 5 April, Publish: 12 April 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Dampak Gaya Kepemimpinan Terhadap Keteraturan Masyarakat Adat Minangkabau di Nagari Manggopoh Lubuk Basung

Achmad Fajar Putra¹, Syamsir², M. Alfin Hidayatullah³, Rayhan Owen Tenggara⁴, Hilman Mulki Syaenra⁵, M. Ferdian Abduravi⁶, M. Hanif Assadiqi⁷, Muhammad Iqbal⁸

¹Universitas Negeri Padang, m.alfinhidayatullah22@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, syamsirsaili@yahoo.com

³Universitas Negeri Padang, malifin.h@gmail.com

⁴Universitas Negeri Padang, tunggara.rayhan@gmail.com

⁵Universitas Negeri Padang, mulki.hilman@gmail.com

⁶Universitas Negeri Padang, ferdian.abduravi@gmail.com

⁷Universitas Negeri Padang, assadiqimhanif@gmail.com

⁸Universitas Negeri Padang, miqbal11@gmail.com

Corresponding Author: m.alfinhidayatullah22@gmail.com¹

Abstract: *The purpose of this research is to investigate how the leadership style in Nagari Manggopoh contributes to creating social order. The research method used is descriptive research with a semi-qualitative approach. Data collection techniques employed by the researcher include observation, interviews, documentation, and literature review (library research). In Nagari Manggopoh, leaders adopt a Democratic leadership style by involving consensus in decision-making. They not only govern but also act as nurturers for the community. Leaders are responsible for seeking the best solutions to the problems faced by the community. They set a good example through their actions, intelligent ideas, and innovative thinking. The governance structure in Nagari Manggopoh consists of three institutions: the government institution, the traditional institution, and the community institution. Each institution plays a role in decision-making through consensus in the Musyawarah Nagari forum. The Minangkabau customs play a significant role in the daily life of the Nagari Manggopoh community by combining Islamic values, traditions, and local wisdom. Maintaining order in the Nagari Manggopoh society is important to create certainty, order, stability, and to preserve harmony among diverse individuals.*

Keywords: *Leadership Style, Indigenous Society, Nagari Manggopoh*

Abstrak: Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan di Nagari Manggopoh dalam menciptakan keteraturan masyarakat atau social order. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneliti deskriptif dengan pendekatan semi

kualitatif. Dalam memperoleh data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur (library research). Di Nagari Manggopoh, pemimpin menerapkan gaya kepemimpinan Demokratis dengan melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak hanya memerintah, tetapi juga menjadi pengayom masyarakat. Pemimpin bertanggung jawab dalam mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka memberikan contoh yang baik melalui tindakan, ide-ide cerdas, dan pemikiran inovatif. Struktur pemerintahan di Nagari Manggopoh terdiri dari tiga lembaga: lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki peran dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama dalam forum Musyawarah Nagari. Adat Minangkabau memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Manggopoh dengan menggabungkan nilai-nilai Islam, tradisi, dan kearifan lokal. Keteraturan dalam masyarakat Nagari Manggopoh penting untuk menciptakan kepastian, ketertiban, stabilitas, serta menjaga harmoni antara individu-individu yang beragam

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Masyarakat Adat, Nagari Manggopoh

PENDAHULUAN

Keteraturan dalam masyarakat merupakan aspek yang penting untuk menciptakan kepastian, ketertiban, stabilitas, serta menjaga harmoni antara individu-individu yang beragam. Dalam konteks Nagari Manggopoh, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana gaya kepemimpinan di Nagari Manggopoh berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat atau social order.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan semi kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur (library research).

Dalam konteks Nagari Manggopoh, gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan Demokratis. Pemimpin di Nagari Manggopoh tidak hanya memerintah, tetapi juga menjadi pengayom masyarakat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pemimpin tersebut memberikan contoh yang baik melalui tindakan, ide-ide cerdas, dan pemikiran inovatif.

Struktur pemerintahan di Nagari Manggopoh terdiri dari tiga lembaga, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama dalam forum Musyawarah Nagari. Adat Minangkabau juga memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Manggopoh dengan menggabungkan nilai-nilai Islam, tradisi, dan kearifan lokal.

Dalam artikel ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai konsep kepemimpinan, masyarakat, dan adat Minangkabau sebagai latar belakang penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai pentingnya keteraturan dalam masyarakat Nagari Manggopoh untuk mencapai kepastian, ketertiban, stabilitas, dan harmoni antara individu-individu yang beragam.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana gaya kepemimpinan di Nagari Manggopoh berperan dalam menciptakan keteraturan masyarakat atau social order. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemimpinan, masyarakat, dan adat Minangkabau, serta dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi, dan pihak terkait lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Gaya Kepemimpinan

Pemimpin adalah individu yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mempengaruhi, mengajak, mengumpulkan, dan menggerakkan orang lain dalam menangani masalah yang ada pada saat itu. Mereka memiliki kemampuan untuk membina individu lain dan membentuk kesatuan kerja di mana mereka bekerja bersama-sama dan rela berkorban demi kesuksesan pekerjaan tersebut (Pasolong, 2008; Karjadi, 2007).

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang berdasarkan pada kemampuan pribadi untuk mendorong atau mengajak orang lain melakukan tindakan yang diterima oleh kelompoknya. Seorang pemimpin juga memiliki keahlian khusus yang sesuai dengan situasi tertentu. Hal ini mencakup kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahan-bawahannya sehingga mereka mau melaksanakan kehendak pemimpin, meskipun secara pribadi mereka mungkin tidak menyukainya.

Suranta dalam Regina (2010:15) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah aturan perilaku yang dipraktikkan oleh seseorang ketika berusaha mempengaruhi perilaku orang lain. Hasbar Mustafa H (2014:52); (A. Mustanir & Jaya, 2016) mengemukakan gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat.

Masyarakat

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan berinteraksi secara sosial. Istilah "society" digunakan untuk merujuk pada interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan dalam suatu kelompok. Asal kata "masyarakat" berasal dari kata Latin "socius" yang berarti "kawan" dan dari kata Arab "syaraka" yang berarti "ikut serta dan berpartisipasi". Masyarakat memiliki keberadaan yang mandiri dan objektif, terlepas dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Masyarakat dapat dianggap sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama, berinteraksi, dan saling bercampur untuk jangka waktu yang cukup lama. Mereka memiliki kesadaran akan menjadi kesatuan dan membentuk suatu sistem kehidupan bersama.

Menurut pemikiran Emile Durkheim, masyarakat juga melibatkan kebiasaan, tata cara, wewenang, kerja sama, penggolongan, pengawasan, serta kebiasaan-kebiasaan manusia dalam sebuah sistem. Pendapat lain dari Mac Iver dan Page menyatakan bahwa masyarakat adalah sistem yang melibatkan kebiasaan, tata cara, wewenang, dan kerja sama antar kelompok dengan pengawasan terhadap tingkah laku dan kebiasaan manusia. Ralph Linton menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mereka mampu mengatur diri dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batasan yang jelas.

Adat Minangkabau

Adat Minangkabau adalah sistem nilai, norma, dan tradisi yang berakar pada kebudayaan masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang kaya dan unik, yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Prinsip utama dalam adat Minangkabau adalah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi dan kearifan lokal Minangkabau. Adat ini menghormati leluhur dan nenek moyang yang dianggap memiliki peran sentral dalam menentukan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Keekerabatan dalam masyarakat Minangkabau juga berbasis matrilineal, di mana keturunan, harta, dan kekuasaan diwariskan melalui garis keturunan perempuan.

Pemerintahan tradisional di Minangkabau diatur oleh "ranah nagari" yang dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut "datuk". Sistem ini mementingkan musyawarah, kebersamaan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Adat Minangkabau mencakup berbagai aspek penting, seperti pernikahan adat, adat rumah tangga, adat keluarga,

adat dalam pengambilan keputusan, dan adat dalam penyelesaian konflik. Seni dan budaya Minangkabau, termasuk tari tradisional, musik, dan literatur, juga berperan penting dalam mempertahankan identitas dan keberlanjutan adat Minangkabau. Meskipun terpengaruh oleh perubahan sosial dan modernisasi, adat Minangkabau terus hidup dan dilestarikan oleh masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai adat ini menjadi landasan dalam menjaga harmoni sosial, kerukunan antarwarga, dan kehidupan berbudaya yang khas di komunitas Minangkabau.

Keteraturan Masyarakat (Social Order)

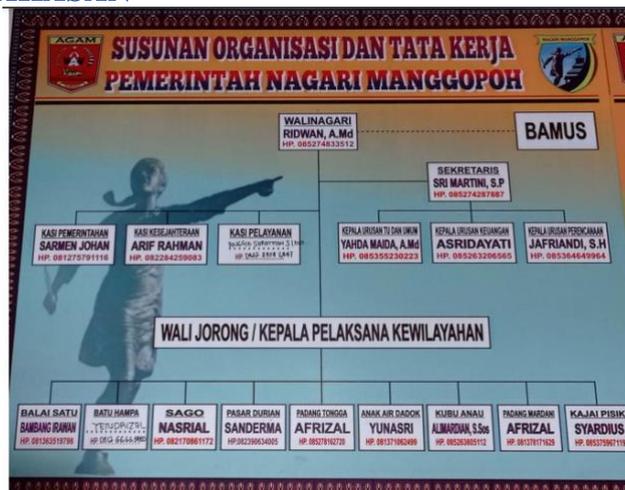
Keteraturan dalam masyarakat mengacu pada adanya struktur, aturan, norma, dan kebiasaan yang mengatur interaksi antara individu-individu dalam suatu komunitas. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan sosial, sistem pemerintahan, kehidupan sehari-hari, dan kegiatan ekonomi. Keteraturan dalam masyarakat penting karena menciptakan kepastian, ketertiban, dan stabilitas. Ini memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara efektif dan menjaga harmoni antara individu-individu yang beragam. Keteraturan juga membantu masyarakat dalam menyelesaikan konflik, melindungi hak-hak individu, dan mencapai tujuan bersama.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa keteraturan dalam masyarakat dapat berbeda-beda tergantung pada nilai, norma, dan struktur yang berlaku di setiap masyarakat. Keteraturan dapat bervariasi antara budaya, negara, atau wilayah yang berbeda, dan bisa mengalami perubahan seiring waktu dan perkembangan masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan semi kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Wali Nagari Manggopoh yang beralamat di Jl. Raya Siti Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten agam. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan model Sugiyono yaitu Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Struktur Pemerintahan Nagari Manggopoh

Kepemimpinan di Nagari Manggopoh menganut gaya kepemimpinan Demokratis. Gaya kepemimpinan Demokratis ini mengutamakan musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan juga pelayanan masyarakat di nagari Manggopoh. Hal ini di implementasikan dalam setiap lembaga kenagarian di inisiasi oleh wali nagari untuk mengambil segala macam keputusan dengan berpatokan kepada hasil rundingan masalah dimasyarakat dengan ditandai dengan berjalan nya forum Musna atau Musyawarah Nagari dalam mendiskusikan solusi atas

masalah dinamika dimasyarakat. Musna ini dapat membahas segala macam komplain dari masyarakat, baik itu individu maupun kelompok. Musna juga menghasilkan beberapa kebijakan baru yang merupakan hasil dari perundingan dari semua elemen struktural adat di nagari contohnya dalam Upacara adat , Pembangunan rumah warga , pesta pernikahan ,Pengutipan iuran kebersihan , pembebasan sengketa lahan , segala macam perizinan di Nagari serta momen peristiwa penting lainnya.Contoh hasil pembahasannya adalah Pembatasan jam pesta pernikahan seperti yang pada awalnya boleh sampai 24 jam sekarang menjadi hanya boleh sampai jam 12 malam saja,apabila melanggar peringatan pertama akan di ingatkan terlebih dahulu, peringatan kedua adalah di ingatkan oleh kerapatan adat,dan yang terakhir apabila tetap melanggar akan di bubarkan secara paksa oleh pihak kenagarian.

Bagi Kepemimpinan Nagari Manggopoh ini , Indikator pemimpin yang diimplementasikan dalam praktek memimpin di masyarakat adalah tipe pemimpin yang bukan hanya pemimpin yang memerintahkan kebijakan saja , tetapi merupakan pemimpin yang mengayomi masyarakatnya . Pemimpin tersebut memiliki tanggung jawab mengetahui semua keluh kesah dimasyarakat dan mencari solusi yang terbaik untuk masalah di masyarakat. Dalam proses pemerintahnya , pemimpin tersebut juga harus memberikan Contoh yang teladan bagi masyarakat nya , baik itu tindakan nya maupun terobosan ide ide atau pemikiran pemimpin yang Cerdas. Seorang pemimpin juga harus mempunyai ide ide yg besar.

Dalam struktur pemerintahannya,Pemerintah Nagari Manggopoh terbagi menjadi 3 lembaga. Lembaga yang pertama yaitu lembaga pemerintahan , BAMUS Dan Wali Nagari . Selanjutnya Lembaga adat ,seperti bundo kanduang, niniak mamak, alim ulama . Yang ketiga yaitu, Lembaga kemasyarakatan seperti Lnpm, pkk ,karang taruna.Setiap lembaga yang terkandung dalam Struktur dalam Kenagarian ini berperan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan , yang akan selalu berpatokan pada hasil musyawarah bersama pada forum Musyawarah Nagari.

Pembahasan mengenai kebijakan Wali Nagari Manggopoh dapat diuraikan sebagai berikut:

Penegakan Norma Agama

Penegakan norma agama merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Manggopoh dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan ini diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis, antara lain kerjasama dengan para tokoh agama, mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah agama, dan pembinaan moral di sekolah-sekolah. Adanya bukti konkret dari kebijakan ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta adanya kesadaran moral yang lebih tinggi di kalangan masyarakat Manggopoh.

Dampak dari kebijakan ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Adanya partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam pengajian, ceramah agama, dan kegiatan keagamaan lainnya menunjukkan bahwa kebijakan penegakan norma agama ini berhasil memperkuat keterlibatan masyarakat dalam praktik keagamaan. Partisipasi yang meningkat ini juga dapat mencerminkan adanya dorongan dari masyarakat itu sendiri untuk lebih mendalami nilai-nilai agama dan meningkatkan kehidupan spiritual mereka.

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada kesadaran moral yang lebih tinggi di kalangan masyarakat Manggopoh. Dengan adanya pembinaan moral di sekolah-sekolah, generasi muda dapat diajarkan tentang pentingnya perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Hal ini dapat membentuk kesadaran moral yang kuat di kalangan mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Kesadaran moral yang lebih tinggi ini berpotensi menghasilkan masyarakat yang lebih bertanggung jawab, etis, dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kebijakan penegakan norma agama yang diterapkan oleh Wali Nagari Manggopoh merupakan langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Melalui kerjasama dengan para tokoh agama dan melalui kegiatan keagamaan serta pembinaan moral di sekolah-sekolah, kebijakan ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan serta membentuk kesadaran moral yang lebih tinggi di kalangan masyarakat Manggopoh.

Pembatasan Organ Tunggal Sampai Jam 00:00

Pembatasan organ tunggal sampai jam 00:00 di Wali Nagari Manggopoh merupakan kebijakan yang diimplementasikan dengan tujuan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan suara yang berlebihan di malam hari serta memberikan waktu istirahat yang cukup bagi masyarakat. Melalui pembatasan waktu ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Salah satu alasan utama di balik penerapan kebijakan ini adalah untuk mengatasi gangguan suara yang dapat terjadi akibat kegiatan organ tunggal di malam hari. Organ tunggal adalah bentuk hiburan tradisional yang seringkali melibatkan alat musik dan suara yang cukup bising. Dalam beberapa kasus, kegiatan organ tunggal dapat berlangsung hingga larut malam, menyebabkan gangguan bagi warga yang ingin istirahat.

Bukti dari keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui penurunan keluhan masyarakat terkait gangguan suara di malam hari. Sebelum kebijakan ini diterapkan, mungkin ada banyak keluhan yang dilaporkan oleh warga terkait gangguan suara yang tidak diinginkan. Namun, dengan adanya pembatasan waktu, kegiatan organ tunggal yang berpotensi mengganggu dapat dikendalikan dan jumlah keluhan masyarakat mengalami penurunan signifikan.

Selain itu, dampak positif dari pembatasan ini juga tercermin dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya waktu istirahat yang cukup di malam hari, masyarakat dapat mendapatkan tidur yang berkualitas dan memulai hari berikutnya dengan energi yang cukup. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat juga dapat menikmati lingkungan yang lebih tenang dan nyaman di malam hari, menjadikan lingkungan sekitar lebih baik untuk tinggal.

Penanggulangan Bencana Banjir

Penanggulangan bencana banjir di Wali Nagari Manggopoh merupakan kebijakan yang dirancang dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan aset-aset penting dari dampak buruk yang disebabkan oleh bencana banjir. Kebijakan ini mencakup serangkaian langkah yang berfokus pada pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul dan saluran drainase, serta penyediaan sarana evakuasi yang memadai.

Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, adanya penurunan jumlah korban jiwa dan kerugian materiil akibat banjir dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan ini telah berhasil melindungi masyarakat dan aset-aset penting dari dampak buruk bencana banjir. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah penanggulangan yang diimplementasikan telah memberikan perlindungan yang efektif.

Secara keseluruhan, kebijakan penanggulangan bencana banjir di Wali Nagari Manggopoh merupakan langkah yang penting untuk melindungi masyarakat dan aset-aset penting. Dengan melibatkan pengembangan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta penyediaan sarana evakuasi yang memadai, kebijakan ini telah memberikan hasil yang positif, ditandai dengan penurunan jumlah korban jiwa dan kerugian materiil akibat banjir, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana.

Jumat Berkah (Pemberian Santunan Fakir Miskin)

Kebijakan Jumat Berkeah yang dilaksanakan oleh Wali Nagari Manggopoh merupakan langkah konkret dalam memberikan santunan kepada fakir miskin setiap hari Jumat. Tujuan

utama dari kebijakan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kepedulian sosial di antara masyarakat. Kebijakan ini memberikan dampak positif yang terlihat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan semangat gotong royong yang lebih kuat dalam membantu sesama.

Salah satu dampak yang signifikan dari kebijakan ini adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Dengan pemberian santunan secara teratur setiap Jumat, beban ekonomi yang ditanggung oleh fakir miskin dapat sedikit terangkat. Santunan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, pendidikan, atau kesehatan. Dalam jangka panjang, peningkatan kesejahteraan ini dapat memberikan dampak positif pada kehidupan mereka, memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik.

Bukti nyata dari keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu adalah indikator yang jelas bahwa kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi mereka yang membutuhkan. Peningkatan kualitas hidup mereka adalah bukti konkret bahwa santunan yang diberikan secara teratur mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup.

Secara keseluruhan, kebijakan Jumat Berkeah yang dilaksanakan oleh Wali Nagari Manggopoh merupakan langkah yang positif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu serta meningkatkan kepedulian sosial di antara masyarakat. Dengan memberikan santunan secara teratur, kebijakan ini berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan memperkuat semangat gotong royong dalam membantu sesama.

Promosi Wisata Lokal (Garuda Mas)

Promosi wisata lokal yang dilakukan oleh Wali Nagari Manggopoh dengan memperkenalkan objek wisata Garuda Mas sebagai potensi unggulan di daerah tersebut adalah langkah strategis untuk mengembangkan sektor pariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, serta mendorong pengembangan infrastruktur pendukung wisata. Bukti dari kebijakan ini dapat dilihat melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan sektor pariwisata, dan pengembangan infrastruktur pendukung wisata di Wali Nagari Manggopoh.

Secara keseluruhan, kebijakan promosi wisata lokal yang dilakukan oleh Wali Nagari Manggopoh untuk memperkenalkan objek wisata Garuda Mas memiliki dampak yang signifikan. Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan sektor pariwisata yang meningkat, dan pengembangan infrastruktur pendukung wisata, kebijakan ini memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian lokal di Wali Nagari Manggopoh.

Digitalisasi Pelayanan Wali Nagari

Kebijakan digitalisasi pelayanan yang diterapkan oleh Wali Nagari Manggopoh merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, melakukan pengajuan surat-surat, dan mengurus administrasi secara online. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui peningkatan kecepatan layanan, kemudahan akses, dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Pertama, kebijakan digitalisasi pelayanan ini memberikan peningkatan dalam hal kecepatan layanan. Dengan adanya sistem digital yang memungkinkan masyarakat untuk

mengurus administrasi secara online, proses yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dapat diselesaikan dengan cepat. Masyarakat tidak perlu lagi mengantri atau menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Dalam beberapa klik, mereka dapat mengakses informasi atau mengajukan permohonan dengan efisien. Hal ini menghemat waktu bagi masyarakat dan mempercepat proses administrasi di pihak Wali Nagari Manggopoh.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dan layanan yang disediakan oleh Wali Nagari Manggopoh dapat diakses secara online. Masyarakat tidak perlu datang secara fisik ke kantor atau lokasi pelayanan untuk mendapatkan informasi atau mengurus administrasi. Mereka dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone. Kemudahan akses ini memungkinkan masyarakat yang berada di daerah terpencil atau jauh dari kantor pelayanan tetap dapat memperoleh layanan yang sama dengan masyarakat di pusat kota. Dengan demikian, kebijakan digitalisasi pelayanan ini memberikan inklusivitas dan kesetaraan akses pelayanan kepada semua masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan digitalisasi pelayanan ini juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan proses yang cepat, mudah, dan efisien, masyarakat merasa lebih terlayani dengan baik. Mereka tidak lagi menghadapi kendala seperti antrian yang panjang atau kesulitan mengumpulkan berbagai dokumen fisik. Selain itu, adanya sistem online juga mengurangi kemungkinan kesalahan atau kehilangan dokumen, karena data dan dokumen tersimpan secara elektronik. Kelebihan ini memberikan rasa percaya diri dan kepuasan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Wali Nagari Manggopoh.

Bukti nyata dari keberhasilan kebijakan ini adalah adanya peningkatan kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat. Data dapat menunjukkan penurunan waktu proses pelayanan, peningkatan jumlah pengajuan online, dan tingkat kepuasan masyarakat melalui survei atau umpan balik dari pengguna layanan. Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan sistem digitalisasi pelayanan ini.

Secara keseluruhan, kebijakan digitalisasi pelayanan yang diterapkan oleh Wali Nagari Manggopoh memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan ini memberikan keuntungan berupa peningkatan kecepatan layanan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Edukasi Masyarakat (Kampung Inggris)

Kebijakan edukasi masyarakat yang diimplementasikan oleh Wali Nagari Manggopoh melalui pembukaan kampung Inggris sebagai tempat pelatihan dan pengajaran bahasa Inggris memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja dan daya saing masyarakat di era global. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui peningkatan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat dan peluang kerja yang lebih luas.

Pertama, kebijakan edukasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat. Dengan membuka kampung Inggris, masyarakat diberikan kesempatan untuk belajar dan mengasah kemampuan berbahasa Inggris secara intensif. Program pelatihan dan pengajaran bahasa Inggris yang diselenggarakan dalam kampung Inggris dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik, masyarakat menjadi lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, karir, dan komunikasi internasional.

Selain itu, kebijakan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesempatan kerja dan daya saing masyarakat. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang umum digunakan dalam dunia bisnis, pariwisata, teknologi, dan berbagai sektor lainnya. Dengan meningkatnya kemampuan berbahasa Inggris masyarakat, mereka memiliki keunggulan kompetitif dalam mencari pekerjaan dan bersaing di pasar tenaga kerja. Masyarakat yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja yang multikultural dan berkomunikasi dengan mitra bisnis internasional. Dengan demikian, kebijakan edukasi ini membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing mereka di era global.

Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui peningkatan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat. Data mengenai partisipasi dan prestasi peserta pelatihan, hasil ujian kemampuan bahasa Inggris, serta testimoni dari masyarakat yang telah mengikuti program edukasi dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, peningkatan jumlah lowongan pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris juga dapat menjadi bukti bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap peluang kerja masyarakat.

Secara keseluruhan, kebijakan edukasi masyarakat melalui pembukaan kampung Inggris oleh Wali Nagari Manggopoh memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris masyarakat dan membuka peluang kerja yang lebih luas. Dengan penguasaan bahasa Inggris yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi persaingan di era global dan meningkatkan daya saing mereka. Kebijakan ini memberikan manfaat jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia dan potensi ekonomi di Wali Nagari Manggopoh.

Perpustakaan Nagari

Kebijakan pendirian perpustakaan nagari yang diterapkan oleh Wali Nagari Manggopoh memiliki tujuan penting dalam meningkatkan minat baca dan akses terhadap informasi bagi masyarakat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui penyediaan koleksi buku yang beragam, fasilitas yang nyaman, serta program-program kegiatan literasi. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat melalui peningkatan minat baca masyarakat, jumlah kunjungan ke perpustakaan, dan partisipasi dalam kegiatan literasi.

Pertama, kebijakan ini bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat. Dengan menyediakan perpustakaan nagari yang lengkap dengan koleksi buku yang beragam, masyarakat diberikan kesempatan untuk membaca dan mengakses informasi yang bermanfaat. Perpustakaan menjadi tempat yang memfasilitasi kegiatan membaca dengan nyaman dan menyenangkan. Melalui program-program yang diselenggarakan, seperti pelatihan membaca, bincang buku, dan kegiatan literasi lainnya, masyarakat didorong untuk aktif membaca dan meningkatkan minat baca mereka. Dengan meningkatnya minat baca, masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang penting untuk perkembangan pribadi dan profesional.

Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan akses terhadap informasi bagi masyarakat. Perpustakaan nagari menjadi tempat yang menyediakan sumber informasi yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Dengan adanya koleksi buku yang beragam, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai topik dan mendapatkan pengetahuan yang luas. Selain itu, perpustakaan juga dapat memberikan akses ke bahan pustaka digital atau e-book, sehingga memperluas lagi akses terhadap informasi. Dengan akses yang mudah dan tersedia, masyarakat dapat menggali pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup.

Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan minat baca masyarakat. Data tentang jumlah peminjaman buku, partisipasi dalam program-program kegiatan literasi, dan survei kepuasan pengunjung perpustakaan dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan

ini. Selain itu, jumlah kunjungan ke perpustakaan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan, karena semakin banyak kunjungan menunjukkan minat dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap perpustakaan nagari tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan pendirian perpustakaan nagari oleh Wali Nagari Manggopoh memiliki peran penting dalam meningkatkan minat baca dan akses terhadap informasi bagi masyarakat. Melalui penyediaan koleksi buku yang beragam, fasilitas yang nyaman, serta program-program kegiatan literasi, kebijakan ini memberikan manfaat dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan masyarakat.

Menghidupkan Kembali Siskamling

Kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam menghidupkan kembali Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) memiliki tujuan yang penting dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kebijakan ini melibatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan patroli, mengadakan siskamling rutin, dan saling mengingatkan terhadap potensi kejahatan. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penurunan angka kejahatan di Wali Nagari Manggopoh serta peningkatan rasa aman masyarakat.

Pertama, kebijakan menghidupkan kembali Siskamling merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi aktif warga, kebijakan ini mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan terawat. Warga yang terlibat dalam Siskamling memiliki peran penting dalam melakukan patroli, memantau aktivitas di lingkungan sekitar, serta melaporkan potensi kejahatan kepada aparat keamanan. Melalui kebijakan ini, masyarakat di Wali Nagari Manggopoh dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan dan merawat lingkungan tempat tinggal mereka.

Selanjutnya, keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penurunan angka kejahatan di Wali Nagari Manggopoh. Dengan adanya Siskamling yang aktif, potensi kejahatan dapat diminimalisir. Patroli rutin, pemantauan lingkungan, dan saling mengingatkan antarwarga menjadi langkah pencegahan yang efektif dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal. Data statistik mengenai penurunan angka kejahatan, seperti pencurian, perampokan, dan tindak kejahatan lainnya, dapat menjadi bukti keberhasilan kebijakan ini.

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan rasa aman masyarakat. Dengan adanya Siskamling yang aktif, masyarakat merasa lebih aman dan nyaman tinggal di lingkungan mereka. Kehadiran Siskamling memberikan jaminan keamanan dan ketertiban yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan tanpa rasa khawatir. Peningkatan rasa aman ini juga berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam menghidupkan kembali Siskamling memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Melalui kebijakan ini, partisipasi aktif warga diwujudkan dalam menjaga keamanan lingkungan dengan melakukan patroli, mengadakan siskamling rutin, dan saling mengingatkan terhadap potensi kejahatan. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penurunan angka kejahatan di Wali Nagari Manggopoh serta peningkatan rasa aman masyarakat.

Membuat Terobosan Penggunaan Lidi Kelapa sebagai Kerajinan Tangan

Kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam mendorong penggunaan lidi kelapa sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan memiliki tujuan yang penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada hasil olahan lidi kelapa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan produksi kerajinan tangan dari lidi kelapa, pengembangan pasar kerajinan lokal, serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Pertama, kebijakan ini berfokus pada pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan mendorong penggunaan lidi kelapa sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan, Wali Nagari Manggopoh memberikan perhatian pada sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Lidi kelapa merupakan bahan yang melimpah dan dapat dimanfaatkan secara kreatif dalam pembuatan kerajinan tangan. Dengan mengembangkan potensi ini, daerah tersebut dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam produksi kerajinan tangan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada hasil olahan lidi kelapa. Dengan melalui proses pengolahan yang kreatif dan inovatif, lidi kelapa dapat diubah menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika dan kegunaan. Misalnya, lidi kelapa dapat dijadikan anyaman, tempat penyimpanan, dekorasi, dan lain sebagainya. Dengan memberikan nilai tambah pada lidi kelapa, produk kerajinan tangan tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari peningkatan produksi kerajinan tangan dari lidi kelapa. Data mengenai jumlah produksi, variasi produk, dan peningkatan kualitas dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, pengembangan pasar kerajinan lokal juga menjadi bukti keberhasilan kebijakan ini. Dengan adanya pasar yang kuat dan berkembang, produk kerajinan tangan dari lidi kelapa dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat luas, baik di tingkat lokal maupun di luar daerah. Hal ini akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam mendorong penggunaan lidi kelapa sebagai bahan baku untuk kerajinan tangan memiliki peran yang penting dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada dan menciptakan nilai tambah pada hasil olahan lidi kelapa. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi kerajinan tangan, pengembangan pasar, serta peningkatan kualitas produk.

Kegiatan Kemasyarakatan (Voli, Takraw, dan Lain-lain)

Kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam mengadakan kegiatan kemasyarakatan, seperti turnamen voli, takraw, dan kegiatan lainnya, memiliki tujuan yang penting dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kesehatan, serta kebugaran masyarakat. Kebijakan ini juga berperan sebagai sarana hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta peningkatan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat.

Pertama, kebijakan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar masyarakat. Melalui kegiatan kemasyarakatan, seperti turnamen voli dan takraw, masyarakat memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan berkompetisi secara sehat. Kegiatan ini membawa masyarakat bersama-sama dalam semangat persaingan yang positif dan mempererat hubungan antarindividu serta komunitas. Masyarakat dapat saling mendukung, berkolaborasi, dan membangun hubungan sosial yang lebih erat melalui kegiatan tersebut. Dengan demikian, kebijakan ini berperan penting dalam menciptakan rasa persaudaraan yang kuat dan hubungan yang harmonis antara masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Kegiatan olahraga, seperti voli dan takraw, memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Melalui partisipasi dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat menjaga kebugaran fisik, meningkatkan ketahanan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit. Olahraga juga dapat menjadi sarana untuk melatih keterampilan motorik, koordinasi, dan kekuatan fisik. Dengan

adanya kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka secara aktif.

Bukti keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. Data mengenai jumlah peserta dan tingkat partisipasi dalam turnamen voli, takraw, dan kegiatan lainnya dapat menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, peningkatan kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui penurunan jumlah penyakit terkait kehidupan tidak sehat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup aktif dan sehat.

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak positif pada peningkatan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat. Melalui kegiatan kemasyarakatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling mendukung, berkolaborasi, dan bekerja sama dalam tim. Hal ini dapat membangun hubungan yang lebih erat antarwarga, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan serta solidaritas di antara mereka. Dengan kehadiran kegiatan yang menyenangkan dan positif seperti ini, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam berinteraksi dan bekerja bersama.

Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil oleh Wali Nagari Manggopoh dalam mengadakan kegiatan kemasyarakatan, seperti turnamen voli, takraw, dan kegiatan lainnya, memiliki peran yang penting dalam mempererat tali persaudaraan, meningkatkan kesehatan, serta kebugaran masyarakat. Melalui kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berinteraksi, berkompetisi secara sehat, dan meningkatkan kesehatan fisik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terciptanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan hubungan yang harmonis di antara masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Nagari Manggopoh, gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan Demokratis yang melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pemimpin di Nagari Manggopoh bukan hanya memerintah, tetapi juga mengayomi masyarakatnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengetahui dan mencari solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pemimpin tersebut memberikan contoh yang teladan dengan tindakan, ide-ide cerdas, dan pemikiran inovatif. Struktur pemerintahan di Nagari Manggopoh terdiri dari tiga lembaga, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan. Setiap lembaga memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah bersama dalam forum Musyawarah Nagari. Adat Minangkabau memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nagari Manggopoh, dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi dan kearifan lokal. Keteraturan dalam masyarakat Nagari Manggopoh penting untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan stabilitas, serta menjaga harmoni antara individu-individu yang beragam.

BIBLIOGRAPHY

- Cahyono, H. (2019). Peran mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 1 (1), 32-41.
- Irwan, I., Latif, A., Sofyan, S., Mustanir, A., & Fatimah, F. (2019). Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5 (1), 32-43.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2 (1), 78-90.
- Mattayang, B. (2019). Tipe dan gaya kepemimpinan: suatu tinjauan teoritis. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(2), 45-52.

- Paramita, P. D. (2011). Gaya kepemimpinan (style of leadership) yang efektif dalam suatu organisasi. *Dinamika Sains*, 9(21).
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.
- Ruman, Y. S. (2009). Keteraturan sosial, norma dan hukum: Sebuah penjelasan sosiologis. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(2), 106-116.
- Thoha, M. (2004). Kepemimpinan dalam manajemen.
- YULIKA, D. F., & Hum, M. (2017). *Epistemologi minangkabau: Makna pengetahuan dalam filsafat adat Minangkabau*. ISI Padangpanjang.